



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah, SWT, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pendapatan Daerah merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Bone Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun-tahun berikutnya.

Watampone, 26 Juli 2024

KEPALA BAPENDA KAB. BONE,

MUHAMMAD IRFAN NUR,S.STP

Pembina TK.I/IVb

NIP.19810528 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN.....	9
2.1 Analis Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	48
BAB V PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomidaerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Bone lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiaya pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan.

Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

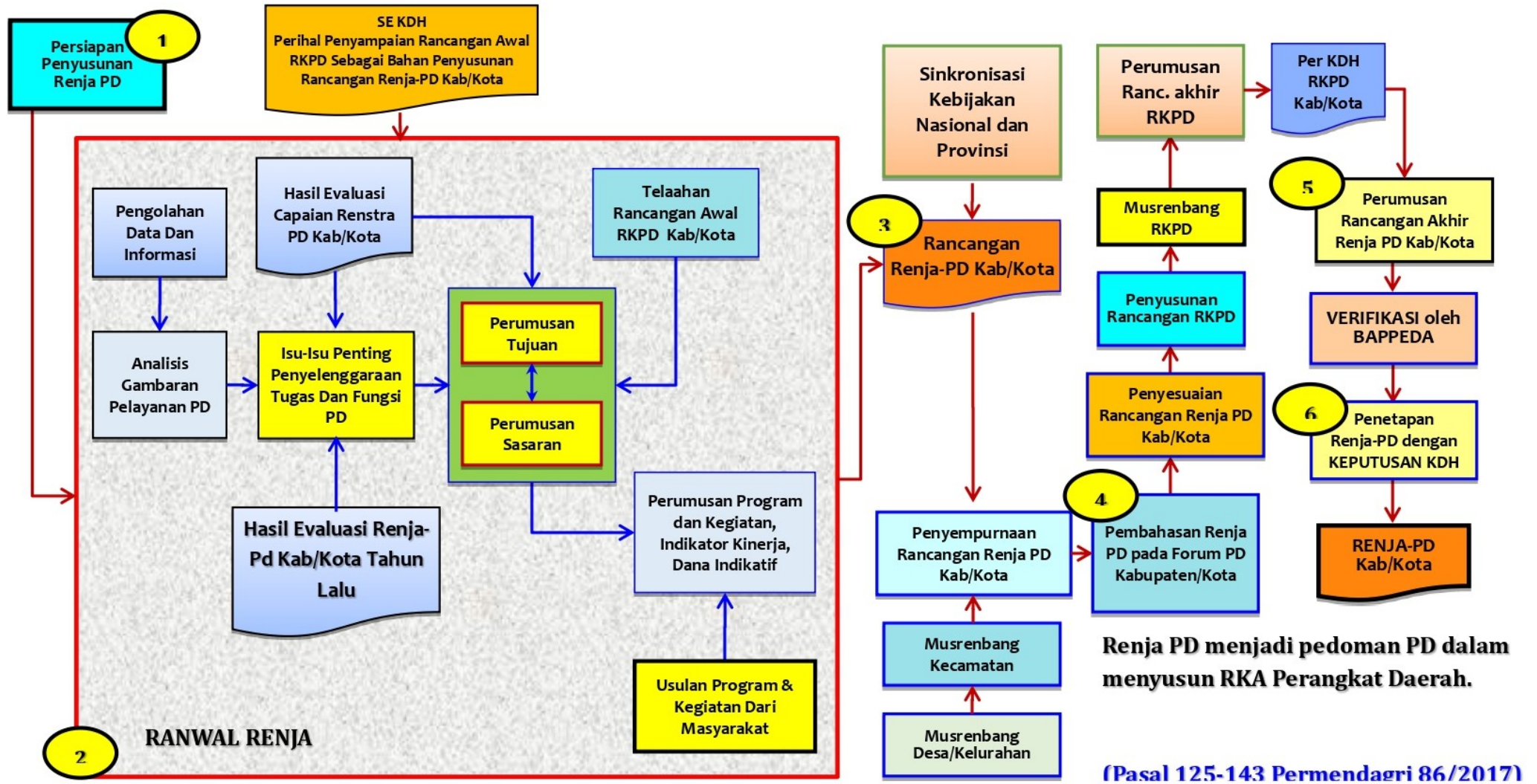
RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, penyusunan rancangan RENJA, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir RENJA dan penetapan RENJA.

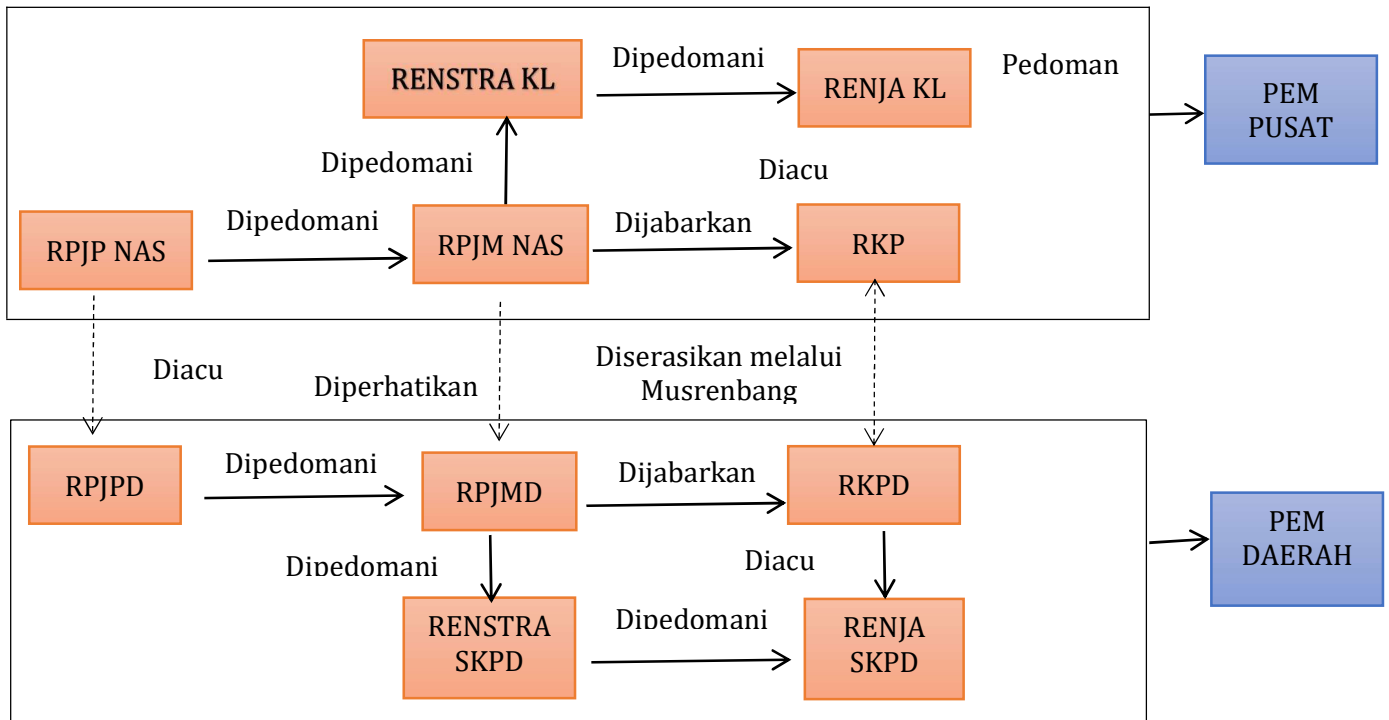
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Rencana Kerja (RENJA) perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan, yang memuat misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Bone dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu RENJA Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran. Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

RENJA perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone (RENSTRA - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone) yang diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah (lima tahun) dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan (rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan instrumen kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun alur penyusunan Renja Badan Pendapatan daerah Kab. Bone sebagai berikut

Gambar 1 Bagian Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





Berdasarkan diagram diatas maka dapat diketahui bahwa keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Dokumen Renstra, renja K/L dan Renja Kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal ini RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan untuk penyusunan Renja dimana RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah yang selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan RKA sampai ke RAPBD. Selain itu melalui diagram diatas juga dapat diketahui bahwa dokumen RPJP NAS, RPJM NAS RK, RENSTRA K/L, RENJA K/L disusun oelh tim Pemerintah Pusat / kementerian lembaga dan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun oleh Tim penyusun tingkat daerah provinsi, Kota/Kabupaten. Sedangkan dokumen Renstra dan Renja disusun oleh Perangkat Daerah yang ada dilingkup pemerintah daerah. Perangkat daerah wajib menyusun renstra setiap 5 tahun sekali dan renja setiap tahun. Dalam rangka penyusunan renstra dan renja perangkat daerah melakukan koordinasi sineran Regi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2024 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pendapatan daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA- SKPD) perubahan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun 2024.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana KerjaPerubahan Badan Pendapatan DaerahKab. Bone Tahun 2024 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Periode Tahun 2024-2026.

Hasil pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baikdan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Program / Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 menggambarkan tentang perkembangan capaian Program / Kegiatan yang berkaitan di setiap bidang terkait, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan Sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023. Untuk menunjang tugas pokok, Program dan kegiatannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mendapat alokasi Dana yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 13.258.536.105 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Rupiah*) untuk belanja Operasi dan untuk Anggaran Belanja Modal tidak dianggarkan keseluruhan Belanja Langsung dialokasikan secara efisien dalam pelaksanaan 2 Program yang terdiri dari 9 Kegiatan, serta 31 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output 6 dokumen perencanaan, target anggaran sebesar Rp. 10.934.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.800.000,- atau sebesar 79 %.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan output 3 dokumen capaian kinerja, anggaran sebesar Rp. 844.000,- dengan realisasi sebesar 0,- atau sebesar 0 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.617.763.007,- terealisasi Rp. 4.968.924.962,- atau sebesar,55%
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub kegiatan yaitu
 1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan output 10 jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah. Anggaran sebesar Rp. 479.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 315.943.500,- atau 93%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output 12 Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan . Anggaran sebesar Rp. 208.598.170,- terealisasi sebesar Rp. 139.029.070,- atau 31 %
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output 9 paket penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 21.005.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.005.100,- atau 67 %
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output 12 paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan. Anggaran sebesar Rp. 405.064.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.940.800,- atau 89%
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output 12 paket penyediaan barang cetak dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan. Anggaran sebesar Rp. 148.617.500,- terealisasi sebesar Rp.130.118.000,- atau sebesar 80 %
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output 12 paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan dengan anggaran Rp. 37,000,000,-

teralisasi sebesar Rp. 13.760.000,- atau 29%

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output 36 Laporan koordinasi dan konsultasi SKPD Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 255.372.000,- dengan realisasi sebesar Rp.145.210.429,- atau 28%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan output 12 Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan dengan anggaran Rp. 66,000,000,- dengan realisasi Rp. 47.220.841,- atau sebesar 50%.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output 12 Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan. Anggaran Rp1.109.806.548,- dengan terealisasi sebesar Rp. 687.490.610,- atau sebesar 43%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output 12 Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala dengan anggaran Rp. 197.404.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 153.228.705,- atau sebesar 47 %
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output 12 Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Anggaran sebesar Rp. 12. 510.000,- dengan realisasi Rp. 8.910.000,- atau 66 %.
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan output 1 paket Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 2.634.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.634.000,- atau 100%

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 9 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan output Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 58.370.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.600.010,- atau sebesar 91%.
2. Penyuluhan & Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan output 200 Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan yang tersebar diberbagai kecamatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 109.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.450.000,- atau sebesar 22 % dengan diadakannya kegiatan sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menambah Obyek pajak sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam pendaftaran sebagai wajib pajak karena adanya sosialisasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan aparat kecamatan, desa dan kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Peningkatan Jumlah Objek Pajak

No	JenisPajak	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Pajak Hotel	56 OP	56 OP
2.	Pajak Restoran	846 OP	846 OP
3.	Pajak Hiburan	8 OP	8 OP
4.	Pajak Reklame	604 OP	417 OP
5.	Pajak Air Tanah	22 OP	22 OP
6.	Pajak Minerba	920 OP	257 OP
7.	Pajak sarang Burung wallet	65 OP	65 OP
8.	BPHTB	2.776 OP	1.565 OP

No	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2024
9.	PBB-P2	622.081 OP	630.124OP
10	SRD	56	56
JUMLAH		627.434	633.416

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa Objek Pajak yang mengalami peningkatan dan penurunan hal ini disebabkan karena data yang tersaji pada tahun 2024 merupakan data sementara dan masih akan terus meningkat sampai masa akhir periode Pajak 31 Desember 2024, adapun pajak yang mengalami penurunan adalah :

1. Reklame tahun pada 2023 Objek Pajak sebesar 604 dan tahun 2024 objek pajak sebesar 417 data tahun 2024 akan terus meningkat sampai dengan masa akhir periode pajak tanggal 31 Desember 2024.
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) Jumlah Objek Pajak pada Tahun 2023 sebesar 920 dan pada tahun 2023 sebesar 257 hal tersebut sangat dipengaruhi dengan kegiatan pembangunan fisik oleh kontraktor (semakin banyak proyek, semakin banyak Objek Pajak Minerba).
3. BPHTB jumlah objek pajak pada tahun 2023 sebesar 2776 dan pada tahun 2024 sebesar 1565 objek pajak pada jenis pajak ini bersifat insidentil yang mana sangat dipengaruhi jumlah Transaksi Balik Nama dan perubahan struktur tanah dan Bangunan.

Selain beberapa Objek Pajak yang mengalami penurunan, juga terdapat Objek Pajak yang mengalami peningkatan yaitu jenis pajak PBB-P2 hal tersebut dipengaruhi oleh pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) meliputi ; perkembangan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan kawasan dan perubahan penetapan zona tanah.

Tabel 2.1
Dokumentasi Sosialisasi Pajak Daerah



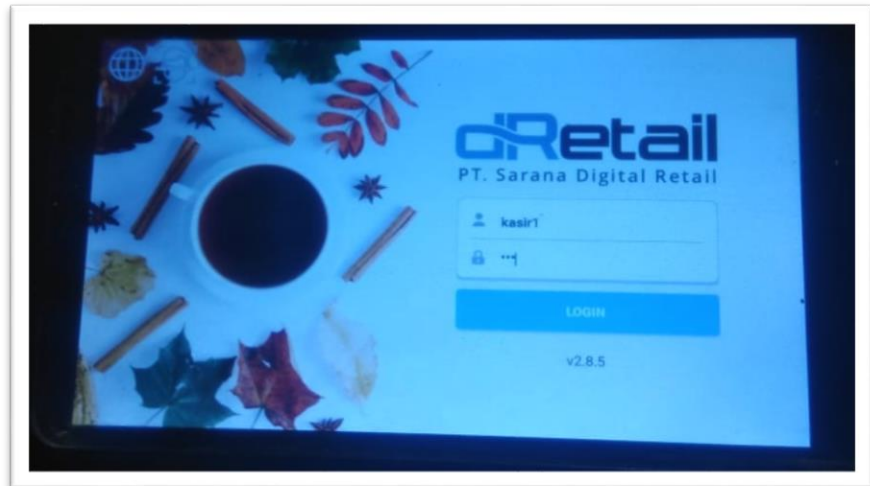
3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan output kegiatan Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi. Sebanyak Anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.240.000,- atau 93%.

Tabel 2.2
Dokumentasi Pendataan Pajak Restoran



4. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan output Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah. Anggaran sebesar Rp. 33.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.870.000,- atau 47%

Tabel 2.3
Dokumentasi Pendataan Pajak Restoran



5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan output jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Anggaran Sebesar Rp. 794.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.780.030.000,- atau 0,49 %.
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan output kegiatan Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah. Anggaran sebesar Rp

32.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.750.000,- atau sebesar 73%

7. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah dengan output Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah. Anggaran sebesar Rp. 616.897.000,- realisasi sebesar Rp592.955.000,- atau 50%

Tabel 2.4

Dokumentasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan



8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan output yaitu Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi. Dengan anggaran sebesar Rp. 31.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.100.000,- atau 100 %
9. Penagihan Pajak Daerah dengan output Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih. Anggaran sebesar Rp 2.284.830.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 530.315.250,- atau 99,9%

Tabel 2.5
Dokumentasi Kegiatan Penagihan



10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan output jumlah kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. Anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.410.000,- atau 63 %
11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah dengan output kegiatan Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah. Anggaran sebesar Rp. 35.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.390.000,- atau 88%

Tabel 2.5

Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah



TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	1			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupa ten kota	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupate n kota	100	persen										
5	2	1	2.01		Perencanaan, Pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	persen		100	pers en				100	per sen		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	dokum en		6	dok ume n	4	dok ume n		6	dok um en		

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
-1										-2	-3	-4		5			6		7
5	2	1	2.01	1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun	4	dokum en		3	dok ume n	1	dok ume n		3	dok um en			
5	2	1	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah													
5	2	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulanbagi pengelola keuangan perangkat daerah	50	Orang/ bulan		12	Ora ng/b ulan	6	Ora ng/b ulan		12	Ora ng/ bula n			

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
-1					-2	-3	-4	5	6		7		(8)=(7/6)	9		10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah												
5	2	1	2.04	1	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	3	dokum en		1	dok ume n	1	dok ume n					
5	2	1	2.04	6	Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	12	dokum en		55	dok ume n	30	dok ume n					
5	2	1	2.04	7	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Lapora n		40	Lapo ran	10	Lap ora n		10	lap ora n		

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)		
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat Daerah														
5	2	1	2.05	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket												
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	orang												
5	2	1	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	orang		10	oran g	1	ora ng							

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
-1					-2	-3	-4	5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	1	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah											
5	2	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	paket		12	Pake t			12	pak et		
5	2	1	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan perlatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	paket		12	Pake t			12	Pak et		

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	12	paket		12	Pake t				12	Pak et			
5	2	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana Kebutuhan	12	paket		12	Pake t				12	Pak et			
5	2	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan	12	dokum en		12	dok ume n				12	dok um en			

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4		5	6		7	(8)=(7/6)		9	10=(5+7)		11= (10/4)	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	12	lapora n		70	Lapo ran				70	lap ora n			
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokum en											
5	2	1	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penunjang urusan													

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
									Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4	5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)		
						pemerintahan													
5	2	1	2.07	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	unit											
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	Paket											
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	9	Unit											

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023				Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)		9	10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	1	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
5	2	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (interntet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	12	Lapora n		12	lapo ran				12	lap ora n			
5	2	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor	12	Lapora n		12	lapo ran				12	lap ora n			
5	2	1	2.09		Pemeiharaan Barang milik daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan													

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
									Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4	5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)		
						daerah													
5	2	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	30	Unit		47	Unit			47	Unit				
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20	Lapora n		12	lapo ran			12	lap ora n				

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)		9	10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit								1	Unit		
5	2	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target													
5	2	4	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah													
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	2	dokum en		1	Dok ume n					1	dok um en		

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)	9	10=(5+7)		11= (10/4)	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	dokum en							1	Dok um en			
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	12	Lapora n		200	Lapo ran				200	lap ora n			
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala	12	Lapora n		610 .76 0	Obje k paja k				12	lap ora n			
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12	Lapora n		4	Dok ume n				12	Lap ora n			

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
-1					-2	-3	-4		5	6		7	(8)=(7/6)		9	10=(5+7)		11= (10/4)	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	622,000	Objek Pajak		1	dokumen				622,000	Objek Pajak			
5	2	4	2.01	8	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapanpajak daerah (penetapan)	7	Dokumen		7	Dokumen				7	Dokumen			
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	6	layanan		6	Layanan				6	Layanan			
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	12	Laporan		4	Laporan				12	Laporan			

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023				Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					-2	-3	-4		5	6		7		(8)=(7/6)		9	10=(5+7)		11= (10/4)
5	2	4	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	12	dokum en		610 .76 0	Obje k Paja k				12	Dok um en			
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	dokum en		1	Dok ume n				1	Dok um en			
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12	dokum en		3	Kegi atan				12	Dok um en			
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12	Lapora n		3	Dok ume n				12	Lap ora n			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja perangkat daerah utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap perangkat daerah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, perangkat daerah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Dapat diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2024

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja
1.	Tujuan : Meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah	Rasio PAD	persen	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan Oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone
1.2	Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase Rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	persen	$\frac{\text{Realisasi PAD N} - \text{Realisasi PAD (-N)}}{\text{Realisasi (-N)}} \times 100$ Ket : (N) Tahun ini (-N) Tahun Lalu Sumber data: Realisasi Pendapatan

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja
1.3	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	persen	<u>Persentase realisasi aplikasi layanan pendapatan X100</u> <u>Persentase jumlah aplikasi layanan pendapatan daerah</u>

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	9.05	10.50	10.62	10.50	7.69	8.98	10	73.24	84.56	95
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	BB	A	BB	115.38	120	100
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	5.90	13.35	6.50	6.50	-34.78	15.46	17	(260.52)	237.85	262
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan data table diatas menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang sangat signifikan antara realisasi target dan capaian kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

RASIO PAD

Realisasi kinerja Tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 Nilai realisasi sebesar 8,98% dengan capaian 84,56 dan pada tahun 2023 dengan nilai realisasi 10% dengan capaian 95% atau Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.438.572.357.410 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 249.697.394.546

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 15,46 dengan capaian 237,85 dan tahun 2023 sebesar 17% dengan capaian kinerja 262%.

Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Realisasi kinerja tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan yaitu tahun 2022 dengan nilai A dan tahun 2023 dengan nilai BB

Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 15,46 dengan capaian 237,85 dan tahun 2023 sebesar 17% dengan capaian kinerja 262%.

Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp 60,49 kemudian meningkat menjadi 70,87 milyar dan 75,57 pada tahun 2023 atau secara rata-rata bertumbuh 11,44 persen per tahun.

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2021 – 2023 menurun dari kisaran antara Rp 19,28 milyar, menurun 8,36 dan meningkat di tahun 2023 sebesar 9,65 Milyar . Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 22,18 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata

pertumbuhannya mencapai angka 13,62 persen per tahun. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,17 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 13,04 persen pada tahun 2021. Penurunan nilai dan sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2023 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dari Rp 13,68 milyar menjadi 14,24 Milyar pada tahun 2023 meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan sebesar 12,87 Milyar atau bertumbuh secara rata-rata 11,09 persen per tahun.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Yang Asli Daerah Yang Sah yang merupakan komponen ke empat dari Pendapatan Asli daerah yang setiap tahun jumlahnya fluktuatif. Yang disebabkan Pencatatan pada penerimaan pendapatan daerah sering berubah-ubah. Selama periode Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Antara tahun 2021 dan 2023 meningkat dengan rata rata 2,34 % diakibatkan berbagai factor. Salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya penerimaan jasa giro liquiditas karena pengeluaran dana dari kas daerah semakin lancar.

Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021-2023, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Realisasi Pendapatan Daerah Daerah 2018-2021

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	RATA ²
					(%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PAJAK DAERAH	60,49	70,87	75,57	11,44
2	RETRIBUSI DAERAH	19,28	8,36	9,65	-18,07
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13,68	12,87	14,24	11,09
4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	83,57	112,73	143,11	2,43

Sumber Data: Bidang Sistem Informasi Pendapatan Bapenda

TABEL TC 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP			B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Pada tahun 2021 dari target B mencapai BB dengan pencapaian 125% hal ini menunjukkan pencapaian hasil evaluasi SAKIP oleh APIP sangat baik.
2	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	-	-	13.35	6.5	6.5	11.94	-260.52	6.5	6.5	11.94	
3	Aplikasi Layanan Pendapatan daerah			4	5	6	-				-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bone. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategi.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir

- g. Pajak Air Tanah
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- i. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bone.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, Badan Pendapatan Kabupaten Bone melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
- b. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian
- c. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Propinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.
- e. Penerapan pelaporan keuangan untuk jenis pajak hotel dan restoran telah secara online dengan menggunakan alat elektronik (mpos).
- f. Optimalisasi pelaksanaan Pemeriksaan pembayaran Pajak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pendapatan Kabupaten Bone sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan dan pembangunan.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas :
 - a) Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c) Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya yang masih belum optimal;
 - d) Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara merata dibandingkan dengan jumlah titik operasional pelayanan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan ;
- 2) Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas :
 - a) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
 - b) Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

3. Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada peluang dan juga tantangan yang harus diambil. Peluang dan Tantangan tersebut harus bisa menjadi tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah, dimana peluang dan tantangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tantangan yang harus dihadapi terdiri atas :

- a) Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Bone, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
- b) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2) Peluang yang dihadapi terdiri atas :

- a) Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- b) Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Bone.
- c) Kondisi sosial di Kabupaten Bone cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bone. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- d) Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
- e) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN,

dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	12,312,029,882	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	12,312,029,882	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	49,252,770,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	49,252,770,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkatdaerah yang tersusun	5 dokumen	29,672,060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkatdaerah yang Tersusun	5 dokumen	29,672,060	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	19,580,710	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	19,580,710	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	8,054,541,812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	8,054,541,812	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 org/bulan	7,065,596,856	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 org/bulan	7,065,596,856	
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	100%	445,118,570	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	100%	516.182.800,00	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen	40,181,410	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen	40,181,410	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	55 Ketetapan Retribusi	15,941,210	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	55 Ketetapan Retribusi	15,941,210	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 dokumen	388,995,950	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 dokumen	388,995,950	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	12,050,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	12,050,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	12,050,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	12,050,000	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100%	296,627,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100%	296,627,100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Paket	70,169,250	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Paket	70,169,250	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	11,499,450	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	11,499,450	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	12 paket	65,866,400	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Bapenda	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	12 paket	65,866,400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	45,078,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	45,078,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	33,600,000	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	33,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah laporan koordinasi dankonsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerahJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	70,414,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerahJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 laporan	70,414,000	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SKPD					Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	62,377,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	62,377,000	
	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah unit peralatandan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	62,377,000	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Bapenda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	62,377,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	988,457,996	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	988,457,996	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakandisediakan disediakan	12 laporan	916,457,996	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakandisediakan disediakan	12 laporan	916,457,996	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	301,337,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	301,337,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya secara rutin/berkala	48 unit	163,913,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya secara rutin/berkala	48 unit	163,913,100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	15,630,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	15,630,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi in Lainnya	1 unit	121,794,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi in Lainnya	1 unit	121,794,200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100%	3,091,212,290	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100%	3,091,212,290	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah	100%	3,091,212,290	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah	100%	3,091,212,290	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	71,546,540	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		48,071,360	48,071,360	48,071,360	
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	48,071,360	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		48,071,360	48,071,360	48,071,360	
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkalaJumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	120,742,950	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkalaJumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	120,742,950	
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	84,849,660	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	84,849,660	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	7 jenis	53,572,410,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	7 jenis	53,572,410,00	
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	610.76 objek pajak	432,354,480	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	610.76 objek pajak	432,354,480	
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	7 Dokumen	54,599,610	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	7 Dokumen	54,599,610	
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	644,999,330	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	644,999,330	
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	67,014,980	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	67,014,980	
10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,461,482,450	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	610.660 wajib pajak	1,752,059,240	

Tabel 2.7 T-C 31

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerahJumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	37,798,640	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerahJumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	37,798,640	
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	67,752,290	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	67,752,290	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi.

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) serta Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi,

Dengan berpedoman pada sasaran pembangunan nasional wilayah Sulawesi maka, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 adalah Dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan koridor dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor faktorkunci keberhasilan (Critical Success Faktor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pendapatan Daerah. Untuk itu, telah disusun Indikator Kinerja Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Persen)	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah		Rasio PAD	10,50		
	Meningkatny A Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah/ K ab/Kota	9,344,943,313
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6.50	Pengelola An Pendapat an daerah	5.594.882.630
	Meningkatny a penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapata n daerah	100		
Jumlah					14,939,825,943

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran sangat penting yang berasal dari sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga.

Berikut ini adalah tabel target penerimaan untuk Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD 2024
		2022	2023	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212,612,167,863.50	248,111,839,837.59	287,720,729,921
4.1.01	Pajak Daerah	70,877,404,025.00	75,625,195,059.94	80,317,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	8,370,140,299.00	9,658,563,736.00	16,287,445,150
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,875,650,432.00	14,245,947,898	13,036,469,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	120,488,973,107.50	148,582,133,144	178,079,815,771
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,898,319,572,096.00	2,116,947,885,191	2,287,443,043,431
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,755,741,502,093.00	1,939,098,651,531	2,118,288,627,000
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	36,421,291,923.00	1,637,969,774,181	12,514,170,000
4.2.01.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,156,076,254	8,946,812,383	8,450,547,000
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum	990,740,188,963.00	1,088,077,784,000	1,232,495,111,000
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus	379,874,388,807	525,729,215,225	571,509,542,000
4.2.01.05	Dana Insentif Daerah	35,144,465,000.00	13,308,076,000	8,577,794,000
4.2.01.08	Dana Desa	313,561,167,400.00	287,820,801,350	284,741,463,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142,578,070,003.00	177,849,233,660	169,154,416,431
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98,725,839,980.00	120,052,393,100	134,698,160,681
4.2.02.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
4.2.02.03	Pendapatan Bantuan Keuangan	43,852,230,023.00	57,796,840,560	34,456,255,750
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	133,151,207,856	71,927,077,674	76,235,954,690
4.3.01	Pendapatan Hibah	95,868,146,163.00	388,085,000	76,235,954,690
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	91,449,502,073	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		6,455,807,984,361	8,542,136,309,529	7,590,242,499,515

Tabel 3.3
Target PAD yang di kelola Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	PAJAK DAERAH	80.317.000.000,
1	PAJAK HOTEL	1.451.833.650,00
2	PAJAK RESTORAN	7.430.128.035,00
3	PAJAK HIBURAN	290.488.222
4	PAJAK REKLAME	2.000.750.000
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	30.568.287.000,
6	PAJAK PARKIR	150.000.000
7	PAJAK AIR TANAH	22.642.000
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	20.850.000
9	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM	1.900.000.000,0
10	PBB	29.631.000.000,00
11	BPHTB	9.294.090.426,00
12	RETRIBUSI DAERAH	105.600.000,00

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang harus dilakukan dalam penganggaran APBD T.A. 2023. Proses pemetaan dilakukan sesuai prinsip-prinsip pemetaan yang berlaku tanpa mengubah indikator- indikator dan target kinerja output dan outcome yang sudah ada dalam Renstra dan RPJMD, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
3. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah
2. Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
3. Sub Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
4. Sub Kegiatan Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Sub Kegiatan Penetapan wajib pajak daerah
7. Sub Kegiatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
8. Sub Kegiatan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
9. Sub Kegiatan Penagihan pajak daerah
10. Sub Kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerah
11. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah
2. Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
3. Sub Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
4. Sub Kegiatan Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Sub Kegiatan Penetapan wajib pajak daerah
7. Sub Kegiatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
8. Sub Kegiatan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
9. Sub Kegiatan Penagihan pajak daerah
10. Sub Kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerah
11. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2024-2026 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Sesuai dengan KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022 terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang terbagi atas 1 Program Prioritas dengan 1 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan serta 1 Program Pendukung dengan 8 Kegiatan dan 19 sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada Bab III sebelumnya. Dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12,312,029,882,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bone.

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target outcome/output program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 T-C 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							12.723.982.616,00	12.604.696.309,00	13.215.350.285,00	491.367.669,00							14.312.311.825,00	
	8	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.723.982.616,00	12.604.696.309,00	13.215.350.285,00	491.367.669,00							14.312.311.825,00	
	8.02	KEUANGAN							12.723.982.616,00	12.604.696.309,00	13.215.350.285,00	491.367.669,00							14.312.311.825,00	
1.	8.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 75%)				100 %	100 %	10.149.696.736,00	10.410.914.329,00	10.589.133.875,00	1.168.828.507,00							11.318.525.243,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.963.360,00	11.478.000,00	11.478.000,00	-31.485.360,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		47.809.696,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	26.323.400,00	10.634.000,00	10.634.000,00	-17.689.400,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			31.705.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.639.960,00	844.000,00	844.000,00	-13.795.960,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			16.103.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	7.963.369.701,00	7.531.835.149,00	7.738.695.195,00	-224.674.506,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	ASN Perangkat Daerah		8.759.706.671,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	7.963.369.701,00	7.531.835.149,00	7.738.695.195,00	-224.674.506,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH RETRIBUTSI DAERAH - LRA, DAJIA, TRANSFER UMUM, DAJIA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			8.759.706.671,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	405.344.590,00	251.750.000,00	251.750.000,00	-153.594.590,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Objek Pajak Daerah		444.088.798,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.697.530,00	0,00	0,00	-24.697.530,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH DAJIA, TRANSFER UMUM, DAJIA ALOKASI UMUM RETRIBUTSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			27.167.283,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	17.902.510,00	0,00	0,00	-17.902.510,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH DAJIA, TRANSFER UMUM, DAJIA ALOKASI UMUM RETRIBUTSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			17.902.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	362.744.550,00	251.750.000,00	251.750.000,00	-110.994.550,00	Kab. Bone, Tanae Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			399.019.005,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	26.125.000,00	22.125.000,00	0,00	-26.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	ASN yang mengikuti bentuk sesuai tupoksinya		76.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

SKPD-RI : dicetak pada 2024-08-15 15:31:23

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	16			DAERAH	18		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pendidikan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	79.925.950,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-62.925.950,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			87.918.545,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	12 Laporan	83.400.460,00	45.500.000,00	33.600.000,00	-49.800.460,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			100.080.552,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PDBP2) serta Bes Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Dasarannya NCHP nya</i>				622000 Objek Pajak	622000 Objek Pajak	396.821.230,00	803.000.000,00	794.500.000,00	397.678.770,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			436.503.353,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	40.109.410,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-23.109.410,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			66.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				6 Layanan	6 Layanan	606.743.170,00	346.332.000,00	616.897.000,00	10.153.830,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			667.417.487,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	38.714.980,00	27.470.000,00	27.470.000,00	-11.244.980,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			46.457.976,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.219.594.450,00	798.389.400,00	918.389.400,00	-301.205.050,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			1.463.513.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	19.841.470,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-7.091.470,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			23.809.764,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	40.370.290,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-19.970.290,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurungu	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamais dan berorientasi pelayanan publik			48.444.348,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
J U M L A H									12.723.982.616,00	12.604.696.309,00	13.216.350.286,00	491.367.669,00								14.312.311.526,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana kerjaPerubahan Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang melalui upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh Stakeholder terkait dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan dalam bagi seluruh pemangku kepentingan , sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2024.